



# BUPATI OGAN ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 90 TAHUN 2022  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan atau antar rincian obyek belanja;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab V Pelaksanaan dan Penatausahaan, huruf T Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran, poin b bahwa Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan pemerintah daerah melakukan perubahan perkara tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Huruf C Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah angka 2 huruf b poin 3 bahwa dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Huruf F Teknis Penyusunan APBD angka 1 huruf f poin 18 bahwa pergeseran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD ditampung dan ditetapkan dalam perubahan Perda tentang APBD dalam hal melakukan perubahan APBD atau dilaporkan dalam LRA dalam hal tidak melakukan perubahan perda tentang APBD;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

1 7 1

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);
14. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1127);
15. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1313);
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022 Nomor 13);
18. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022 Nomor 90);
19. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 254/KPTS/BPKAD/2023 tentang Rincian Alokasi Penerimaan dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 90 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 90 Tahun 2022) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023

a. semula	Rp.	1.578.512.852.018
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>5.387.321.219</u>
Jumlah anggaran pendapatan	Rp.	1.583.900.173.237

yang terdiri atas :

  1. pendapatan asli daerah;
  2. pendapatan transfer; dan
  3. lain-lain pendapatan daerah yang sah
  
2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - (1) Anggaran pendapatan transfer
 

a. semula	Rp.	1.380.612.852.018
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>5.387.321.219</u>
Jumlah anggaran pendapatan transfer	Rp.	1.386.000.173.237

yang terdiri atas

    1. pendapatan transfer pemerintah pusat
    2. pendapatan transfer antar daerah
  - (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat
 

a. semula	Rp.	1.296.555.992.946
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat	Rp.	1.296.555.992.946
  - (3) Pendapatan transfer antar daerah
 

a. semula	Rp.	84.056.859.072
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>5.387.321.219</u>
Jumlah pendapatan transfer antar daerah	Rp.	89.444.180.291
  
3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - (1) Pendapatan transfer antar daerah
 

a. semula	Rp.	84.056.859.072
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>5.387.321.219</u>
Jumlah pendapatan transfer antar daerah	Rp.	89.444.180.291

yang terdiri atas pendapatan bagi hasil
  - (2) Pendapatan bagi hasil
 

a. semula	Rp.	84.056.859.072
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>5.387.321.219</u>
Jumlah pendapatan bagi hasil	Rp.	89.444.180.291

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023

a. semula	Rp.	1.673.512.852.018
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>5.387.321.219</u>
Jumlah anggaran belanja daerah	Rp.	1.678.900.173.237

yang terdiri atas :

1. belanja operasi;
2. belanja modal;
3. belanja tidak terduga; dan
4. belanja transfer.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Anggaran belanja operasi

a. semula	Rp.	1.068.349.681.351
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>15.166.439.669</u>
Jumlah anggaran belanja operasi	Rp.	1.083.516.121.020

yang terdiri atas :

1. belanja pegawai
2. belanja barang dan jasa
3. belanja bunga
4. belanja subsidi
5. belanja hibah dan
6. belanja bantuan sosial

(2) Belanja pegawai

a. semula	Rp.	600.748.696.770
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>25.000.000</u>
Jumlah belanja pegawai	Rp.	600.773.696.770

(3) Belanja barang dan jasa

a. semula	Rp.	435.934.359.794
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>15.141.439.669</u>
Jumlah belanja barang dan jasa	Rp.	451.075.799.463

(4) Belanja bunga

a. semula	Rp.	136.381.771
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah belanja bunga	Rp.	136.381.771

(5) Belanja subsidi

a. semula	Rp.	1.192.000.000
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah belanja subsidi	Rp.	1.192.000.000

(6) Belanja hibah

a. semula	Rp.	30.338.243.016
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah belanja hibah	Rp.	30.338.243.016

(7) Belanja bantuan sosial

a. semula	Rp.	0
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah belanja bantuan sosial	Rp.	0

Handwritten signature and date at the bottom right corner.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Anggaran belanja modal			
a. semula	Rp.	318.299.189.905	
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(9.779.118.450)</u>	
Jumlah anggaran belanja modal	Rp.	308.520.071.455	
yang terdiri atas :			
1. belanja modal tanah			
2. belanja modal peralatan dan mesin			
3. belanja modal gedung dan bangunan			
4. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi			
5. belanja modal aset tetap lainnya dan			
6. belanja modal aset tidak berwujud			
(2) Belanja modal tanah			
a. semula	Rp.	4.187.922.059	
b. bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0</u>	
Jumlah belanja modal tanah	Rp.	4.187.922.059	
(3) Belanja modal peralatan dan mesin			
a. semula	Rp.	61.969.429.888	
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>4.006.036.950</u>	
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin	Rp.	65.975.466.838	
(4) Belanja modal gedung dan bangunan			
a. semula	Rp.	77.367.054.927	
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(12.770.457.400)</u>	
Jumlah belanja modal gedung bangunan	Rp.	64.596.597.527	
(5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi			
a. semula	Rp.	170.249.213.714	
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(1.014.698.000)</u>	
Jumlah belanja jalan, jaringan dan irigasi	Rp.	169.234.515.714	
(6) Belanja modal aset tetap lainnya			
a. semula	Rp.	3.601.568.917	
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0</u>	
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya	Rp.	3.601.568.917	
(7) belanja modal aset lainnya			
a. semula	Rp.	924.000.400	
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0</u>	
Jumlah belanja modal aset lainnya	Rp.	924.000.400	
(8) Belanja modal aset tidak berwujud			
a. semula	Rp.	0	
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0</u>	
Jumlah belanja modal aset tidak berwujud	Rp.	0	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 3 APRIL 2023

BUPATI OGAN ILIR,

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal 3 APRIL 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2023 NOMOR : 15

SALINAN

Handwritten marks and signature at the bottom right corner.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 3 APRIL 2023  
BUPATI OGAN ILIR,

dto

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal 3 APRIL 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2023 NOMOR : 15

Salinan sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

IMTIHANA, SH, M. Si  
Pembina Tk. I/ IV.b  
NIP. 19750217200801 2 001